

**TRANSFORMASI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DI
PERGURUAN TINGGI: PERAN SATUAN PENGAWAS
INTERNAL DALAM PENCAPAIAN *GOOD UNIVERSITY
GOVERNANCE* SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PPK-BLU**

(Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

MUHAMMAD FAQIH FAHRIZA

NIM 4321064

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**TRANSFORMASI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DI
PERGURUAN TINGGI: PERAN SATUAN PENGAWAS
INTERNAL DALAM PENCAPAIAN *GOOD UNIVERSITY
GOVERNANCE* SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PPK-BLU**

(Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

MUHAMMAD FAQIH FAHRIZA

NIM 4321064

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faqih Fahriza

NIM : 4321064

Judul Skripsi : **Transformasi Sistem Pengawasan Internal di Perguruan Tinggi: Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Pencapaian *Good Uninversity Governance* Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2025
Yang menyatakan,



Muhammad Faqih Fahriza

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Faqih Fahriza

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Muhammad Faqih Fahriza
NIM : 4321064
Judul Skripsi : **Transformasi Sistem Pengawasan Internal di Perguruan Tinggi: Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Pencapaian Good University Governance Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2025
Pembimbing,

Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.
NIP. 198907082020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Faqih Fahriza**
NIM : **4321064**
Judul Skripsi : **Transformasi Sistem Pengawasan Internal di Perguruan Tinggi: Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Pencapaian *Good Uninversity Governance* Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)**

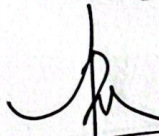
Dosen Pembimbing : **Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.**

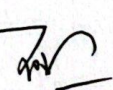
Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

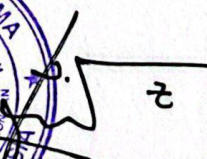

Agus Arwani, M.Ag.
NIP. 197608072014121002


Abdul Ghofar Saifudin, M.S.I.
NIP. 198402222019031003

Pekalongan, 10 Juli 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. A. M. Muhiy/Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d : 11)

“Jangan takut gagal, keberhasilan sering kali berasal dari pengalaman kegagalan.”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam. Atas segala kasih sayang dan limpahan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis sepenuhnya sadar, keterbatasan dan kekurangan dalam pengerjaan skripsi mengharuskan penulis untuk terus belajar. Semoga karya ini bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai bermanfaat bagi setiap pembacanya. Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis dibersamai oleh berbagai pihak yang mendukung dengan tulus dan mendo'akan tanpa putus. Oleh karenanya, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Alm. Bapak Nur Fathoni dan Almh. Ibu Surati selaku kedua orang tua saya. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tanpa penyemangat dari kalian berdua.
2. Kedua kakak dan kedua adik saya, Cindy, Elsa, Luna dan Rara. Terima kasih sudah memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak. yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Dosen Pembimbing Akademik saya, Bapak M. Nasrullah, S.E., M.S.I yang senantiasa memberikan arahan penulis semasa kuliah.
6. Pihak Satuan Pengawas Internal dan Bagian Keuangan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat penulis yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi dan memberikan semangat..

ABSTRAK

MUHAMMAD FAQIH FAHRIZA. Transformasi Sistem Pengawasan Internal di Perguruan Tinggi: Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Pencapaian *Good Uninversity Governance* Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Transformasi kelembagaan perguruan tinggi ke dalam status Badan Layanan Umum (BLU) membawa implikasi penting terhadap sistem tata kelola dan pengawasan keuangan. Perubahan ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, namun juga menuntut penguatan sistem pengawasan internal yang efektif dan akuntabel. Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG), terutama dalam konteks transisi kelembagaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SPI sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan menggunakan indikator independensi, kemampuan profesional, lingkup kerja audit internal, pelaksanaan pemeriksaan, dan manajemen audit internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap SPI, bagian keuangan, serta mahasiswa. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Stewardship, yang menempatkan SPI sebagai aktor yang bertindak atas dasar tanggung jawab, integritas, dan orientasi terhadap kepentingan institusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan BLU, peran SPI mengalami peningkatan dari segi kewenangan, cakupan kerja, dan kontribusi terhadap pencapaian prinsip GUG, khususnya transparansi dan akuntabilitas. SPI tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit administratif pengawasan, tetapi telah berkembang menjadi mitra strategis yang proaktif dalam menilai risiko, mendorong efisiensi anggaran, dan mengawal akuntabilitas keuangan. Temuan ini sejalan dengan asumsi dasar Teori Stewardship, bahwa pengelola organisasi dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan institusi, bukan semata-mata kepentingan individu. Dengan demikian, transformasi kelembagaan mendorong terwujudnya tata kelola universitas yang lebih profesional, partisipatif, dan berintegritas.

Kata Kunci: Satuan Pengawas Internal, Badan Layanan Umum, *Good University Governance*.

ABSTRACT

MUHAMMAD FAQIH FAHRIZA. *Transformation of the Internal Control System in Higher Education Institutions: The Role of Internal Audit Units in Achieving Good University Governance Before and After the Implementation of PPK-BLU (A Case Study at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)*

The institutional transformation of higher education into Public Service Agency (BLU) status brings significant implications for governance systems and financial oversight. This change provides greater flexibility in budget management but also demands the strengthening of an effective and accountable internal control system. The Internal Audit Unit (Satuan Pengawas Internal or SPI) plays a strategic role in ensuring the realization of Good University Governance (GUG) principles, particularly in the context of this institutional transition.

This study aims to analyze the role of SPI before and after the implementation of the PPK-BLU at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, using indicators such as independence, professional competence, scope of internal audit work, audit implementation, and audit unit management. The study adopts a qualitative exploratory approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and observation involving SPI, the finance division, and students. The theoretical framework employed is Stewardship Theory, which views SPI as an actor driven by responsibility, integrity, and institutional orientation.

The findings indicate that following the implementation of BLU status, the role of SPI has strengthened in terms of authority, audit coverage, and its contribution to achieving GUG principles, particularly transparency and accountability. SPI no longer functions merely as an administrative oversight unit but has evolved into a strategic partner that actively assesses risks, promotes budget efficiency, and ensures financial accountability. These results align with the core assumptions of Stewardship Theory, which holds that organizational agents can be trusted to act in the institution's best interest, rather than for personal gain. Thus, institutional transformation has fostered more professional, participatory, and integrity-based university governance.

Keywords: Internal Audit Unit, Public Service Agency, Good University Governance.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Transformasi Sistem Pengawasan Internal di Perguruan Tinggi: Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Pencapaian *Good Uninversity Governance* Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Proses pengerjaan skripsi hingga selesai ini tentunya melibatkan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. A.M. Muh Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak M. Nasrullah, S.E., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan semasa perkuliahan.
7. Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang senantiasa berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Satuan Pengawas Internal dan Bagian Keuangan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini.

9. Keluarga tercinta, tehusus kedua orang tua tersayang Alm. Bapak Nur Fathoni, dan Almh. Ibu Surati, serta kakak-kakak dan adik-adik peneliti yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi kepada peneliti.
10. Sahabat-sahabat yang telah banyak memotivasi, yang senantiasa memberikan dorongan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian, semoga Allah SWT. melindungi kita semua, dan penulis berharap penelitian ini bisa memberi manfaat bagi pembacanya. Terima kasih.

Pekalongan, 24 Juni 2025



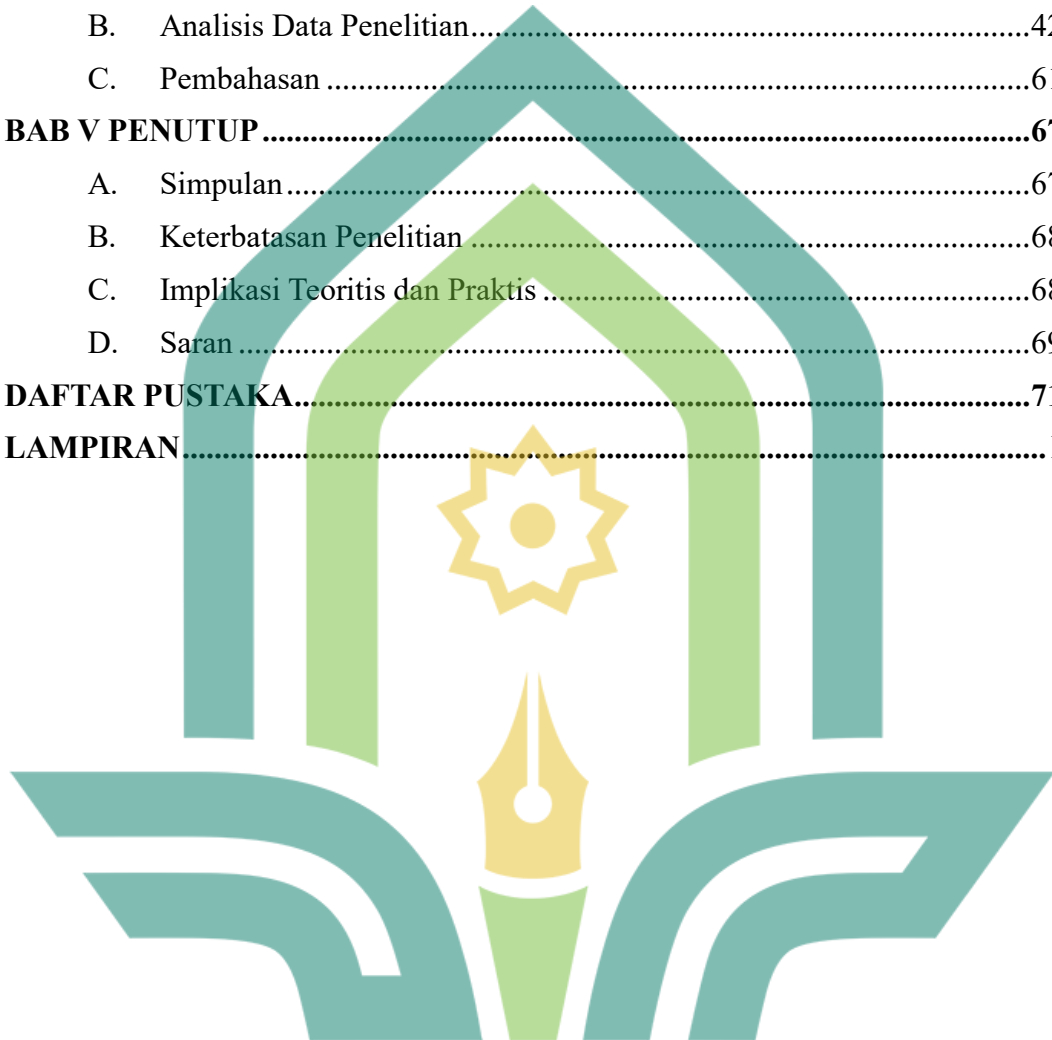
Muhammad Faqih Fahriza



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Telaah Pustaka	24
C. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Setting Penelitian	32
D. Subjek Penelitian	33
E. Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Keabsahan Data	35

H. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi/Subjek Penelitian	38
B. Analisis Data Penelitian.....	42
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Keterbatasan Penelitian	68
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	68
D. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	I



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang di hajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak agamanya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, M.A, 2) Ali Audah 3) Prof. Gazali Dunai 4) Prof. Dr. H. B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M. Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih huruf an, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Da	D	Da
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
س	Za	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ع	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
غ	Ain	”	Koma terbalik (di atas)
ف	Gain	G	Ge
ق	Fa	F	Ef
ك	Qaf	Q	Qi
ن	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
و	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
... َئِ	Fattah dan ya	Ai	a dan i
... ُؤ	Fattah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ Ditulis - Kataba

فَعَلَ Ditulis - Fa'la

ذُكِرَ Ditulis - zükira

يَذْهَبُ Ditulis - yažhabu

سُئِلَ Ditulis - su'ila

كَيْفَ Ditulis - Kaifa

هَوَّلَ Ditulis - Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
أ....ى....	Fattah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى....ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و....ى	Hamzah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ Ditulis Qāla

رَمَى Ditulis Ramā

قِيلَ Ditulis Qīla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup, dengan mendapat harakat fattah, kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مَرَأَتٌ جَمِيلَةٌ Ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta' marbutah mati, dengan mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فَاطِمَةُ Ditulis *fāṭimah*

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- Raudah al-atfāl
- Raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- Al-madīnah al-munawwarah
- Al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ

- Talhah

5. Syaddah

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah atau tasyid tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا

- Rabbanā

نَزَّلَ

- Nazzala

الْبِرُّ

- Al-birr

الْحَجَّ

- Al-hajj

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sembarang.

Contoh:

السَّيِّدُ	- As-sayyidu
الشَّمْسُ	- As-syamsu
الْقَلَمُ	- Al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- Ta'khuẓūna
الْأَنْوَاءُ	- An-nau'
شَيْئٌ	- Syai'un
إِنَّ	- Inna
أَمِرْتُ	- Umirtu
أَكَلٌ	- Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Ditulis	<i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqîn</i>	
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ditulis	<i>Ibrāhîm al-Khalîl</i>	
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	<i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

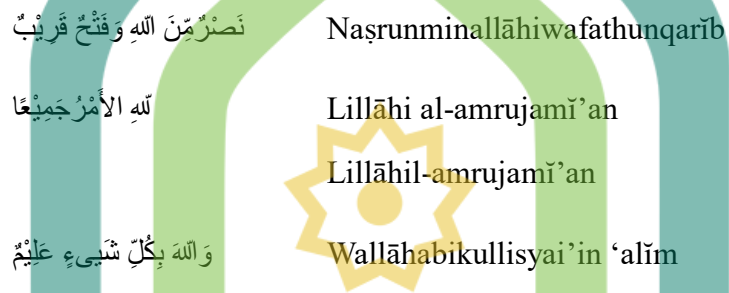
Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Innaawwalabaitinwuḍi'alinnāsilallaẓibib</i>
بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>akkatamubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-</i>
الْقُرْآنُ	<i>Qur'ānu</i>
	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil</i>
	<i>Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubîn</i>
	<i>Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubîn</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahirabbil al-‘ālamīn
Alhamdulillahirabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:



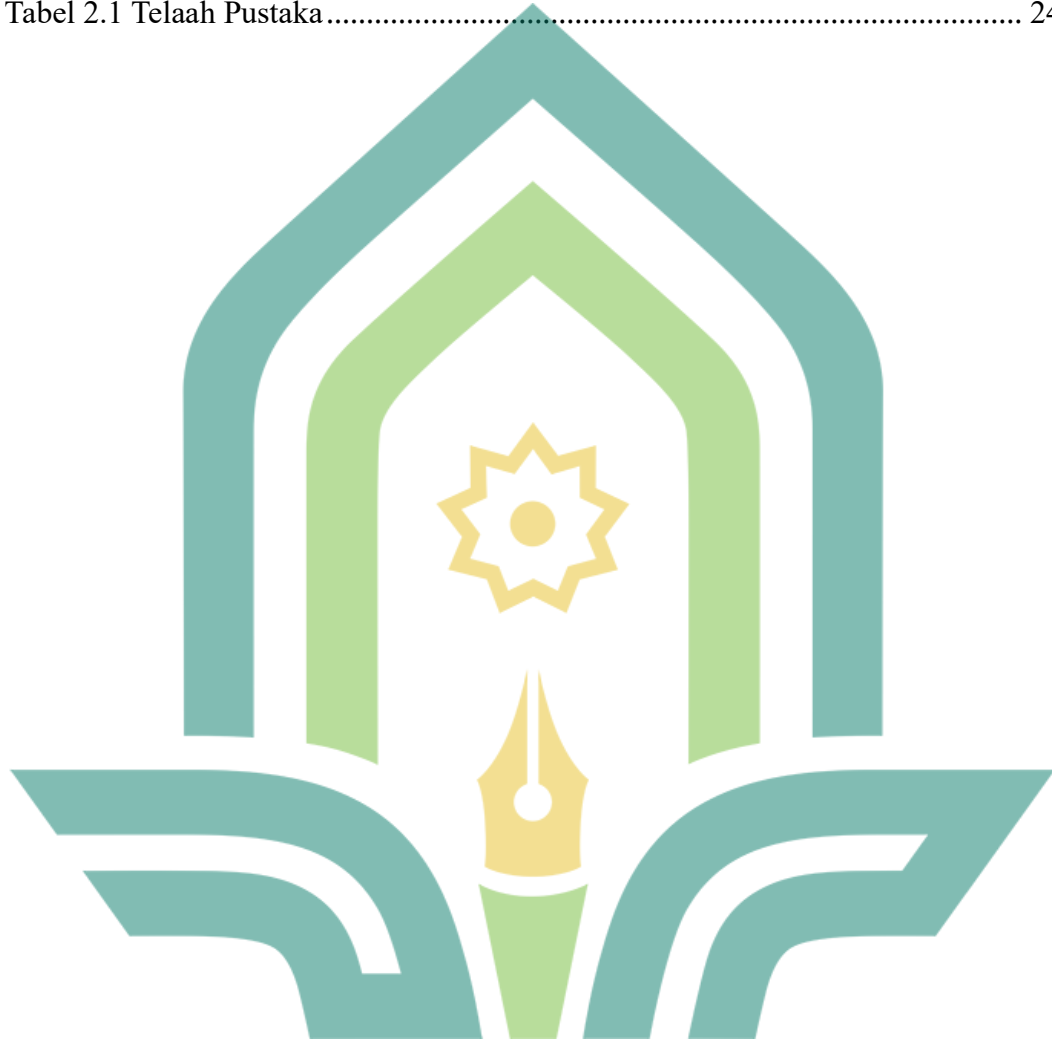
نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrunminallāhiwafathunqarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amrujamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Lillāhil-amrujamī'an
	Wallāhabikullisyai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

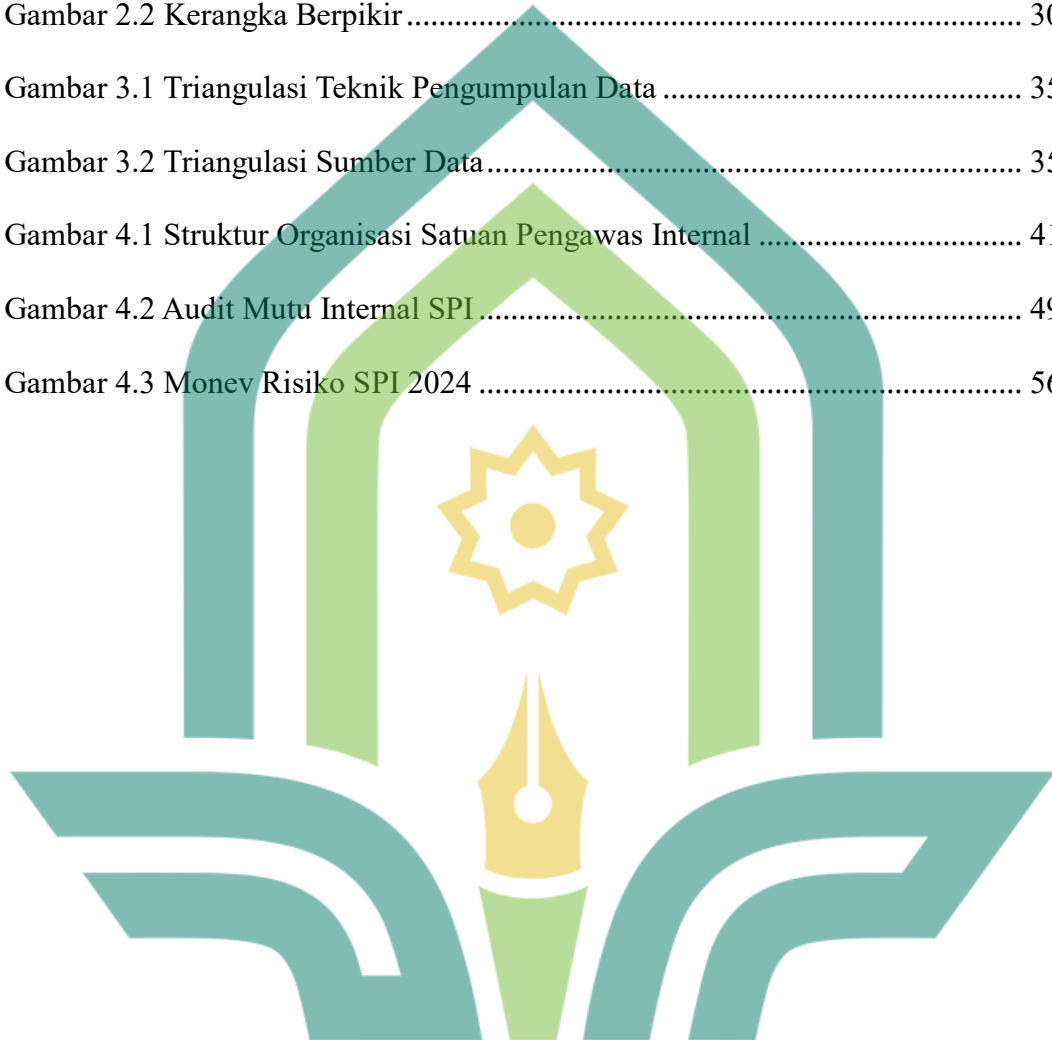
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Pola Pengelolaan Keuangan Satker dan BLU	7
Tabel 2.1 Telaah Pustaka.....	24



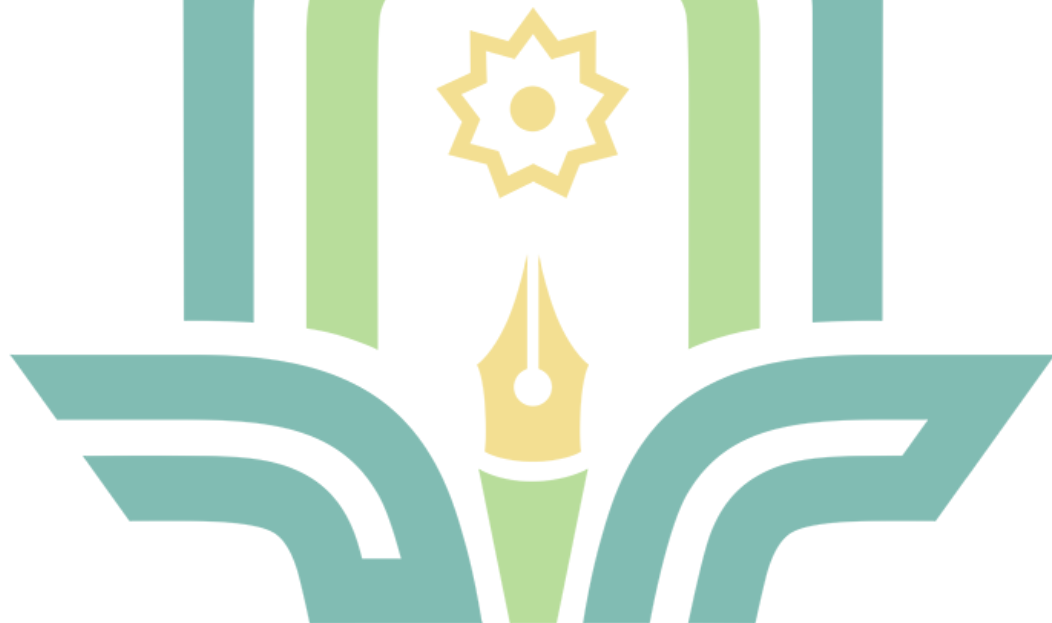
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip Good University Governance	17
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	30
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	35
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal	41
Gambar 4.2 Audit Mutu Internal SPI	49
Gambar 4.3 Monev Risiko SPI 2024	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian.....	I
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	II
Lampiran 3 Panduan Wawancara.....	III
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	VII
Lampiran 5 Contoh Hasil Audit SPI.....	XXXVII
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	XXXVIII
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	XL



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi pendidikan tinggi, yang terbagi dalam berbagai bentuk seperti akademi, politeknik, dan universitas, mengalami perkembangan pesat. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya. Penilaian terhadap institusi tersebut tidak lagi hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas. Kualitas pendidikan tinggi memiliki korelasi erat dengan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan (Syahril et al., 2023).

Satuan Pengawasan Internal (SPI), sebagai komponen dari kerangka pengawasan organisasi, memiliki tugas untuk memfokuskan upaya pada pencapaian tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif. SPI berfungsi sebagai mitra strategis bagi direksi, memberikan saran dan rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap penggunaan sumber daya operasional serta efektivitas sistem dan prosedur yang diterapkan. Selain itu, SPI bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan unit usaha, yang dituangkan dalam laporan audit yang komprehensif. Laporan audit ini harus memuat rekomendasi perbaikan yang konstruktif, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan terkait tindakan korektif. Dengan demikian, SPI berperan penting dalam

memastikan bahwasanya organisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan meraih tujuan strategisnya (Radjaguguk et al., 2014).

Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki peran proaktif dalam melakukan pencegahan kerugian ataupun pemborosan dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Selain itu, SPI menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan memberikan dasar bagi perencanaan strategis di masa depan. Merujuk pada kerangka kerja kontrol internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), SPI dapat dikategorikan dalam lima elemen utama, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan (Syahril, 2019).

Implementasi tata kelola (*governance*) dalam suatu entitas organisasi bersifat kontekstual dan adaptif, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis organisasi, skala operasional, dan budaya organisasi yang berlaku. Demikian pula, tata kelola di lingkungan perguruan tinggi didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, yang menjadikan terciptanya tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance/GUG*). GUG berfungsi sebagai pedoman normatif yang dipergunakan sebagai formulasi untuk menciptakan panduan bagi pihak yang mengelola perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi manajemen dengan efektif dan efisien, dengan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Kantohe & Sumual, 2023).

Keberadaan Satuan Pengawasan Internal di perguruan tinggi berdasar pada UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu juga diatur dalam PMA RI No. 25 Tahun 2017 mengenai SPI Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, sebagai institusi pendidikan tinggi publik, memiliki peranan krusial dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan berintegritas. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi pengelolaan keuangan, pemerintah Republik Indonesia mengimplementasikan kebijakan transformasi PTKIN menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Implementasi status BLU bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada PTKIN, khususnya dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PTKIN sebagai institusi BLU dituntut untuk tidak hanya fokus pada optimalisasi pengelolaan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan (Syahromi & Cheisviyanny, 2020).

Seiring dengan perkembangan regulasi di Indonesia, banyak perguruan tinggi negeri yang mengalami perubahan status kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Status ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan dari layanan publik. Namun demikian, fleksibilitas ini juga menghadirkan

tantangan baru dalam hal pengawasan dan pengendalian internal yang lebih kompleks dan berisiko tinggi.

Pedoman penilaian kinerja BLU di bidang layanan pendidikan sudah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Pendidikan. Aspek keuangan dalam penilaian ini dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap laporan keuangan dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan yang berlaku bagi BLU.

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah bertransformasi menjadi BLU. Perubahan ini berdampak langsung pada sistem tata kelola kampus, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan, manajemen aset, dan tata kelola kelembagaan.

Sebelum bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beroperasi dalam kerangka Satuan Kerja (Satker), yang pendanaannya sepenuhnya bersumber dari APBN. Model Satker ini mengimplikasikan bahwa seluruh penerimaan institusi, termasuk dana pendidikan yang berasal dari mahasiswa, wajib disetorkan ke kas negara melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun mekanisme ini menjamin akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan negara, hal ini menimbulkan konsekuensi berupa keterbatasan fleksibilitas operasional serta responsivitas institusi terhadap dinamika kebutuhan akademik dan operasional.

Status Satker menimbulkan kendala signifikan dalam pengelolaan aset institusi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dalam status ini, tidak memiliki hak kepemilikan atas aset yang dikelolanya, sehingga operasional institusi tunduk pada regulasi ketat yang mengatur penggunaan dan pemeliharaan aset negara. Hal ini berpotensi menghambat kemampuan institusi dalam mengakselerasi pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang mendukung, yang esensial untuk menunjang kualitas proses pembelajaran dan penelitian (Sugianto et al., 2024).

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan secara resmi ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 307 tahun 2023 mengenai penetapan UIN K.H. Abdurrahman Wahid sebagai lembaga pemerintah yang mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLU, yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Agustus 2023. Penetapan ini menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan universitas, dari pola pengelolaan keuangan satuan kerja biasa menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Dengan status BLU, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, namun juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (uingusdur.ac.id, 2023).

Transformasi PTKIN menjadi BLU didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, yang memiliki tujuan dalam rangka menaikkan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan negara. UU Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara menjadi landasan utama, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan PP RI No. 74 Tahun 2012 mengenai Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan BLU memberikan panduan operasional mengenai pengelolaan keuangan BLU. Dalam konteks PTKIN, PMA RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri BLU, menjadi acuan dalam penataan organisasi dan tata kelola universitas. Penetapan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai Satker BLU secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307 tahun 2023, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong PTKIN untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan akuntabel.

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi salah satu PTKIN yang sudah menerapkan status BLU, mengalami perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangannya. Perubahan ini menuntut adanya sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan merujuk pada aturan UU yang diberlakukan. Perguruan tinggi dengan status BLU diwajibkan untuk mengimplementasikan sejumlah prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), di mana transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen esensial. Penerapan kedua prinsip ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dan integritas pengelolaan keuangan.

Berikut dijelaskan secara ringkas perbedaan pengelolaan keuangan antara PTN-Satker dan PTN-BLU melalui tabel berikut (Slamet, 2021):

Tabel 1.1 Perbedaan Pola Pengelolaan Keuangan Satker dan BLU

Aspek	PTN-Satker	PTN-BLU
Orientasi	Non-profit	Not for profit
Otonomi Keuangan	Tidak memiliki otonomi keuangan, semua sumber pendanaan dan penggunaannya dikontrol ketat oleh pemerintah.	Otonomi terbatas atau memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan terutama yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak.
Sumber Pendapatan	Hanya bersumber dari APBN	<i>Income diversification</i> meliputi: (1) Rupiah murni (dari pemerintah pusat); dan (2) PNBPN terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari layanan utama, pemanfaatan aset, profit bisnis komersil, hasil kemitraan, donasi, hasil investasi jangka pendek, dan sumber lain yang sah.
Mendirikan Badan Usaha	Tidak boleh	Atas persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Kementerian Keuangan
Sistem Pendapatan dan Penggunaan Anggaran	Semua pendapatan negara bukan pajak harus disetor ke Kas Negara dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah.	Semua pendapatan masuk kategori PNBPN dan disetorkan ke rekening pendapatan BLU, pendapatan dapat digunakan untuk pengembangan program dengan persetujuan Dewan Pengawas.
Investasi dan Hutang	Tidak diizinkan	Diizinkan
Pengawasan	Internal audit oleh Inspektorat Jendral dan	Internal Audit oleh Inspektorat Jendral dan

	Eksternal audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Eksternal Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik
Laporan Pertanggung Jawaban	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah	Laporan Pertanggungjawaban pengelola anggaran dilakukan secara mandiri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Keuangan
Penetapan Tarif Layanan	Ditetapkan oleh Kementrian Teknis dalam bentuk Peraturan Menteri	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, berdasarkan usulan dari pimpinan PTN-BLU melalui Kementrian Teknis
Dasar Pertumbuhan Besaran Tarif Layanan	Berdasarkan standar biaya operasional pendidikan tinggi yang berlaku	Besar tarif layanan didasarkan oleh: (1) Aspek kontinuitas dan pengembangan layanan; (2) Aspek daya beli masyarakat; (3) Aspek asas keadilan dan kepatuhan; dan (4) aspek kompetisi yang sehat.

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan bertransformasi menjadi BLU di tahun yang sama dengan PTKIN lain seperti UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, UIN Raden Mas Said Surakarta, IAIN Palopo, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan merupakan salah satu perguruan tinggi yang sedang berupaya meningkatkan kualitasnya. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berada pada peringkat ke-812 nasional, peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan dengan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berada pada

peringkat ke-256, dan UIN Raden Mas Said Surakarta dengan peringkat ke-185 (Ghozani, 2025). Kelebihan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai tempat penelitian adalah tersedianya data audit internal yang terdokumentasi dengan baik, serta kemudahan akses terhadap informan. Oleh karena itu, peneliti memilih UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai tempat penelitian ini.

Fenomena *fraud* dan korupsi terdapat pada lingkungan perguruan tinggi, seperti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6,8 miliar dan kasus dugaan korupsi dalam proses membangun gedung laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) yang menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp4,4 miliar, mengindikasikan urgensi implementasi sejumlah prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi (merdeka.com, 2016). Fakta ini menegaskan bahwa praktik *good governance* merupakan faktor krusial dalam memitigasi risiko penyimpangan keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Upaya mewujudkan praktik *good governance* memerlukan keberadaan fungsi audit internal yang efektif dan sistem kontrol internal yang kuat. Dalam konteks Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU), fungsi audit internal diimplementasikan melalui SPI. Keberadaan SPI di Satker BLU berfungsi untuk menguatkan sistem pengendalian internal, yang secara langsung berkontribusi pada pencegahan fraud dan pencapaian tujuan *good governance*. Dengan demikian, sistem kontrol internal yang kuat dan efektif

menjadi prasyarat penting untuk meminimalisasi risiko penyimpangan keuangan dan memastikan implementasi prinsip-prinsip *good governance* secara baik. (Wahyudi et al., 2018).

Sistem pengendalian internal adalah kerangka kerja yang berisikan struktur organisasi, prosedur, dan mekanisme yang terkoordinasi untuk melindungi keberlanjutan entitas organisasi. Tujuan utama dari implementasi sistem kontrol internal yaitu untuk mencapai sasaran organisasi, memitigasi potensi risiko yang tidak terduga, meningkatkan efisiensi operasional, mencegah kehilangan aset, meningkatkan reliabilitas data laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan pada regulasi hukum yang diberlakukan. Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki peran krusial dalam menjamin efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga tercipta akuntabilitas yang terukur. Dengan adanya sistem kontrol internal yang terstruktur, aktivitas organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, dengan demikian dapat meminimalisasi potensi terjadinya penyimpangan dan kesalahan. Sistem kontrol internal yang efektif adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Ulum & Suryatimur, 2022).

Satuan Pengawas Internal (SPI) dipilih sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan SPI memiliki gambaran menyeluruh tentang tata kelola kampus. Selain itu, Peran SPI mewakili prinsip-prinsip *Good University Governance*. Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut peneliti memilih SPI sebagai objek dalam penelitian ini.

Penelitian mengenai sistem pengawasan internal di perguruan tinggi telah banyak dilakukan, beberapa penelitian sebelumnya misalnya Kantohe & Sumual (2023) menunjukkan hasil bahwa peran sistem pengawasan internal sangat penting dalam mencapai GUG. Pada penelitian ini memfokuskan bagaimana perbedaan peran SPI saat kampus belum berstatus BLU dan sesudah BLU.

Berdasarkan ulasan di atas, peneliti tertarik menyusun penelitian dengan judul **“Transformasi Sistem Pengawasan Internal di Perguruan Tinggi: Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Pencapaian *Good Uninversity Governance* Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Studi Kasus Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait independensi dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU?
- 2) Bagaimana peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait kemampuan profesional dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU?
- 3) Bagaimana peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait lingkup pekerjaan audit internal dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU?

- 4) Bagaimana peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU?
- 5) Bagaimana peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait manajemen bagian audit internal dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- 1) Mengidentifikasi peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait independensi dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU
- 2) Mengidentifikasi peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait kemampuan profesional dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU
- 3) Mengidentifikasi peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait lingkup pekerjaan audit internal dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU
- 4) Mengidentifikasi peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU

- 5) Mengidentifikasi peran SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait manajemen bagian audit internal dalam pencapaian *Good University Governance* sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU

Melalui penelitian ini diharapkan penelitian ini memiliki manfaat seperti di bawah ini:

i. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai peranan internal audit atau sistem pengawasan internal di perguruan tinggi. Penelitian ini harapannya mampu menambah pemahaman yang lebih detail terkait dengan dinamika perubahan sistem pengawasan internal dalam konteks transformasi kelembagaan, khususnya dalam penerapan status BLU pada perguruan tinggi.

ii. Manfaat Praktis

i. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini harapannya mampu berperan sebagai referensi yang berharga dan memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini harapannya mampu memicu pengembangan penelitian lebih mendalam.

ii. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini harapannya mampu memberikan evaluasi dan perbaikan terhadap peran SPI dan implementasi audit internal di setiap institusi.

iii. Bagi Auditor Internal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan perbaikan dalam menjalankan perannya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan penelitian tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, diperlukan sistematika penulisan yang jelas. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini akan terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup pembahasan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, telaah pustaka dari penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis penelitian, metode pendekatan penelitian yang digunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan metode analisis data

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi atau subjek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari temuan penelitian, pembahasan mengenai keterbatasan yang ada, serta implikasi teoritis dan praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa SPI berperan penting dalam mendorong tercapainya prinsip-prinsip *Good University Governance*. Transformasi SPI setelah penerapan status BLU menjadikan lembaga ini semakin adaptif dan profesional dalam menghadapi kompleksitas tata kelola universitas

Independensi tetap terjaga baik sebelum maupun sesudah BLU. Namun setelah penerapan status BLU independensi tersebut semakin diperkuat melalui pelaksanaan audit yang berbasis pada SOP yang terstandardisasi dan kejelasan ruang lingkup kerja.

Kompetensi dan profesionalisme auditor SPI mengalami peningkatan signifikan setelah penerapan BLU. SPI telah memiliki auditor dengan latar belakang pendidikan akuntansi serta mengikuti pelatihan profesional, seperti PIA, QRMP, dan pelatihan auditor berbasis risiko, serta pelatihan-pelatihan lain.

Lingkup pekerjaan SPI sebelumnya lebih bersifat administratif dan terbatas. Setelah status BLU, lingkup pekerjaan menjadi lebih luas. SPI juga mulai mengimplementasikan audit berbasis risiko dan manajemen kinerja.

Pelaksanaan kegiatan audit internal dilakukan minimal dua kali setahun, mencakup audit preventif dan *post-audit*. Setelah BLU, terdapat dorongan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas audit serta integrasi teknologi informasi dan sistem pelaporan berbasis KPI.

Manajemen SPI dan evaluasi kinerja menunjukkan adanya transformasi menuju lembaga audit internal yang tidak hanya berfungsi sebagai *watchdog*, tetapi juga sebagai *quality assurance* yang mendorong tata kelola universitas yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Literatur atau penelitian sebelumnya tentang Transformasi BLU pada Perguruan Tinggi yang terbatas, sehingga peneliti harus berusaha lebih untuk mengumpulkan referensi yang relevan.
2. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan belum lama bertransformasi menjadi BLU sehingga data yang tersedia cukup terbatas.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Good University Governance* (GUG) dengan menekankan pentingnya keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai komponen strategis dalam tata kelola perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan relevansi teori legitimasi, di mana praktik audit internal dan transparansi kelembagaan berfungsi sebagai instrumen institusional untuk membangun kepercayaan publik dan memenuhi ekspektasi sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas konteks penerapan teori legitimasi ke dalam ranah pendidikan tinggi Islam berbasis BLU.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi negeri, khususnya PTKIN, dalam memperkuat fungsi SPI. Praktik-praktik terbaik seperti audit berbasis risiko, pelaporan hasil audit secara terbuka, serta penguatan kompetensi auditor dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi institusi. Temuan ini juga dapat digunakan oleh pihak Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan dan pedoman peningkatan efektivitas SPI di lingkungan PTKIN secara nasional.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, terdapat beberapa saran yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Bagi Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal (SPI) diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan melalui penguatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi informasi dalam audit, serta penyusunan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur. SPI juga sebaiknya memperluas cakupan audit ke arah evaluasi kinerja strategis, tidak hanya bersifat administratif dan kepatuhan. Pengembangan audit berbasis risiko dan peningkatan transparansi hasil audit kepada publik juga menjadi langkah penting guna mendorong tercapainya *Good University Governance* (GUG) secara utuh.

2. Bagi Stakeholder

Para pemangku kepentingan kampus diharapkan mendukung keberadaan dan peran SPI sebagai mitra strategis dalam membangun sistem

tata kelola yang baik. Pimpinan universitas perlu menjamin independensi dan memperkuat kewenangan SPI agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif. Unit kerja di lingkungan kampus perlu bersikap kooperatif dan terbuka terhadap proses audit serta menindaklanjuti hasil temuan secara serius. Mahasiswa dan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kampus diharapkan aktif mengawasi implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sinergi antara SPI dan *stakeholder* akan memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan membandingkan implementasi SPI dan tata kelola universitas di beberapa PTKIN lain yang telah berstatus BLU, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan perspektif dosen, tenaga kependidikan, serta auditor eksternal untuk melihat konsistensi dan sinergi peran SPI dalam menciptakan tata kelola yang baik secara lintas unit di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawanti, D., & Aisyah, S. (2017). *Peran Satuan Pengawasan Intern dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good University Governance Pada Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu*. 7(2), 101–114.
- Ayumiati, A., & Jalilah, J. (2023). Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good University Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 129–140. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i1.5319>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Fatmawati, E., Suharto, B., Amrozi, S. R., Suhma, W. K., Yudiawan, A., Ilyasin, M., & Suhma, F. M. (2024). Change management towards good university governance in Indonesia: study at Islamic religious universities based on BLU mandate. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2333081>
- Fitri, S. A., Eficandra, Rahmi, M., Caniago, S., & Putra, Y. E. (2022). Satuan Pengawasan Internal: Harapan dan Realita. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3567–3571. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1406/1171>
- Ghozani, S. (2025). *Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Responsivitas Darurat Sosial Melalui Perencanaan Kontinjensi pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*.
- Ginting, R., Harun, C. Z., & Usman, N. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Good University Governance (Gug) Pada Stkip Bina Bangsa Getsempena. *Visipena*, 11(2), 243–254. <https://doi.org/10.46244/visipena.v11i2.1286>
- Gulo, W. (2015). *Metodologi Penelitian*. Gramedia.
- Haribowo, I., & Mulyani, S. D. (2022). Good University Governance of PTKIN Public Services Agency in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 516. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.36508>
- Hidayah, N., & Ma'arif, S. (2023). Diagnosis Tata Kelola Perguruan Tinggi berbasis Good University Governance. *Edudeena: Journal of Islamic*

Religious Education, 7(2), 110–123. <https://doi.org/10.30762/ed.v7i2.864>

Iskandar, A., Putra, P., & Roni, M. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). *Jurnal Kependidikan Islam*, 11, 2021. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh>

Kantohe, M. S. S., & Sumual, F. M. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Good University Governance. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.57>

Komala, L., & Asaari, M. (2022). Analisis peran satuan pengawasan internal dan komite audit terhadap pencegahan kecurangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5850–5857. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2215>

Larasati, R., Asnawi, M., Hafizrianda, Y., Akuntansi, P. M., & Cenderawasih, U. (2018). Analisis Penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi di Kota Jayapura. 2(2), 304–323.

Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish.

merdeka.com. (2016). *Manipulasi Laporan Proyek Lab Kampus UNM, Kontraktor Jadi Tersangka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/manipulasi-laporan-proyek-lab-kampus-unm-kontraktor-jadi-tersangka.html>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ>

Noviardy, A., & Aliya, S. (2020). Pengaruh Employee Engagement dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Empiris Pada PT. Suryabumi Argolanggeng, Sumatera Selatan). *Journal Management, Business, and Accounting*, 19(3), 258–272.

Nurlatifah, A., Suratman, B., & Hariyati. (2021). Pola Pengelolaan Good University Governance Badan Layanan Umum. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 29–35. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.429>

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007, Pub. L. No. 1, ... Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007 (2007).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Pendidikan (2014).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Pub.

L. No. 25 (2017).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum, Pub. L. No. 31 (2021).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/Pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, 129/PKM.05 Kemenkeu RI 1 (2020). www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (2005).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pub. L. No. 74, 32 (2012).

Radjaguguk, M. S. N., Ramantha, I. W., & Mimba, N. P. S. H. (2014). Komite Audit Terhadap Tingkat Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/BTDC. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 391–402.

Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003

Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=kXIREAAAQBAJ>

S, M. W., & Achadi, A. (2024). *Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Menciptakan Good Hospital Governance Pada Rumah Sakit Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. 8(3), 301–308.

Said, M. M., Ghony, M. D., Arief, N. F., Ahmadi, R., Tabrani, A., Muchsin, S., Pardiman, P., Afifulloh, M., Sumartono, S., Muhibbin, M., Sunardi, S., Mustofa, M., Kurniawati, D. A., & Faradiba, S. S. (2023). Pendampingan Perguruan Tinggi Untuk Mewujudkan Good University Governance. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2456. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14086>

Salim, & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=2fq1DwAAQBAJ>

Slamet. (2021). *Paradigma Baru dan Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Badan Layanan Umum di Indonesia*.

Sugianto, A., Sabila, A., & Muanifah, A. (2024). Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia. *Stratēgo: Jurnal Manajemen ...*, 6(3), 89–101.

<https://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/view/1975%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/download/1975/1991>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Sulila, I. (2021). The Existence of Higher Education in Indonesia as a Public Service Agency in the Implementation of Good University Governance. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 452–463. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1348>

Suriyani, & Zainuddin. (2021). Pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dan Penerapan Internal Control Terhadap Pencapaian Good University Governance (GUG) Pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Jibm*, 4(1), 34–42.

Syahril, S. (2019). Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Pengelolaan Risiko di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.52>

Syahril, S., Sudirman, R., & Rusli, A. (2023). Menelusuri Fungsi Internal Audit dan Sistem Pengendalian Internal Universitas Muhammadiyah Palopo. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16181>

Syahromi, M., & Cheisviyanny, C. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Padang*. 2(2), 2839–2860.

uingusdur.ac.id. (2023). UIN Gus Dur Pekalongan Adakan Sosialisasi Peraturan Rektor Terkait Optimalisasi Pendapatan BLU. <https://www.uingusdur.ac.id/info/uin-gus-dur-pekalongan-adakan-sosialisasi-peraturan-rektor-terkait-optimalisasi-pendapatan-blu>

Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17, 1 (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12 (2012).

UU No 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Bpk.Go.Id 2 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018>

Wahyudi, P., Haming, M., & Junaid Asriani. (2018). Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Internal Terhadap Pencapaian Good University Governance Pada

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Di Indonesia. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(2), 310–317. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/303>

Wijatno, S. (2009). *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan*. Penerbit Salemba Empat. <https://books.google.co.id/books?id=C4L0SAAACAAJ>

Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. <https://books.google.co.id/books?id=5AFiDwAAQBAJ>

